



**TRANSFORMASI
EKONOMI INDONESIA
MENUJU NEGARA MAJU
DAN BERDAYA SAING**

P E M I K I R A N

100

EKONOMI

I N D O N E S I A

INDEF

TRANSFORMASI
EKONOMI INDONESIA
MENUJU NEGARA MAJU
DAN BERDAYA SAING

PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA

INDEF

**Transformasi Ekonomi Indonesia
Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing**
Pemikiran 100 Ekonom Indonesia

Editor:
Berly Martawardaya
Esther Sri Astuti

Penyelaras:
Malik Ruslan

Desain Cover dan Tata Letak:
Sarwo Edhie

ISBN: 978-623-6999-04-2

INDEF
Jl, Batu Merah No. 45 Pejaten Timur, Jakarta 12510
Telp. 021 7901001
Email: indef@indef.or.id
www.indef.or.id

Sekapur Sirih

Buku bunga rangkai menduduki tempat tersendiri dalam spektrum katagori buku. Dari segi jumlah penulis dan kontribusi tiap penulis pada buku, satu titik ujung spektrum adalah buku yang ditulis oleh satu orang dan menjadi kanvas dari curahan pemikiran dan pengalaman seseorang yang dalam dan luas. Buku dengan satu orang penulis seperti *The Wealth of Nation (1776)* karya Adam Smith atau *Membangun Koperasi, Koperasi Membangun* karya Bung Hatta, membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam proses penulisan yang merupakan *magnum opus* serta kristalisasi pemikiran dan pengalaman penulisnya atas permasalahan besar jangka panjang sehingga buku tipe ini adalah terus menjadi rujukan sekian dekade, bahkan abad, setelah terbit. Ujung spektrum lain penerbitan adalah artikel opini pendek yang membahas permasalahan aktual dimana sang penulis akan merasa puas apabila pemetaan masalah dan solusinya diadopsi oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Buku bunga rampai memungkinkan pemikiran opini dari banyak penulis dengan keahlian dan pengalaman masing-masing yang dirangkai dengan benang merah yang disiapkan sejak awal sehingga menjadi mozaik yang layak dirujuk dan dibaca lagi untuk waktu yang (relatif) panjang.

Buku ini adalah ketiga kali-nya INDEF mengumpulkan pemikiran para ekonom dengan judul “Pemikiran 100 Ekonom Indonesia”. Namun hanya kata pertama yang akurat dan bisa dimaknai secara umum dan tanpa perluasan makna. Dari segi jumlah terdapat 107 artikel yang ditulis 113 ekonom (ada beberapa artikel yang *joint authorship*). Para penulis buku ini adalah ekonom dalam arti awal *oikos nomos* yang dalam bahasa Yunani berarti mengatur rumah tangga. Mengurusi rumah tangga negara, apalagi yang sedang menghadapi pandemi, membutuhkan bukan hanya pemikiran dari para ahli ekonomi tapi juga para ahli kesehatan, pertanian, lingkungan, sosial, budaya dan juga teknik/teknologi. Latar belakang para penulis juga berasal dari berbagai profesi: akademisi, *policy maker*, LSM, profesional, pengusaha dll. Kata Indonesia pada judul buku perlu diartikan sebagai ekonom warga negara Indonesia karena editor secara khusus mengajak beberapa ekonom Indonesia yang sedang berdomisili di negara lain untuk menyampaikan perspektifnya yang lebih berjarak dari hingar bingar dalam Indonesia.

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima hal yang menjadi

prioritas dalam lima tahun pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin yaitu 1) Membangun SDM pekerja keras, terampil, dan menguasai teknologi; 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur; 3) Penyederhanaan regulasi; 4) Memangkas birokrasi dan prosedur; 5) Transformasi ekonomi dari mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) menuju manufaktur dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.

Penyusunan buku ini dimulai pada awal tahun 2020 dengan asumsi bahwa pemerintah Jokowi- Ma'ruf Amin dapat memfokuskan kebijakan dan langkahnya untuk mewujudkan lima prioritas diatas khususnya prioritas kelima sebagai. Periode pemerintah 2019-2024 sangat penting karena mengalami bonus demografi dan mendapat mandate politik yang cukup kuat di pilpres sehingga bisa membereskan berbagai PR ekonomi Indonesia. Periode ini adalah tonggak penting dalam meraih Indonesia emas yang mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya pada 2045. Sehingga tema besar buku "Pemikiran 100 Ekonom Indonesia" ini adalah "**Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Negara Maju dan Berdaya Saing**".

Mengganasnya pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah dan masyarakat sipil harus mengalihkan fokus dan energi dari prioritas awal. Ekspektasi meningkatnya investasi dan pertumbuhan tinggi paska pemilu 2019 sesuai pola umum siklus lima tahunan paska reformasi menjadi redup. Pola penyebaran Covid-19 yang menyukai kerumunan dan pergerakan orang menyebabkan langkah penanganan pandemi memiliki dampak ekonomi cukup luas sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada pada minus 2,07%.

Masa pandemi yang penuh tantangan ini memerlukan kolaborasi antar aktor untuk menghasilkan analisa yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang ampuh memulihkan serta memperkuat ekonomi Indonesia. Editor teringat sekaligus berharap pada *Sadli's Law on Indonesian Economic Policy* dimana Prof M. Sadli sebagai ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Tambang dan Energi menyatakan bahwa "*Good times give rise to lazy populist economic policies while crisis times produce good policies.*"

Buku ini adalah upaya mengumpulkan *good policies* dan *good solutions* yang terserak di kepala para akademis, pemerintah, profesional di swasta/BUMN, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha Indonesia. Beberapa diantara artikel di buku ini sudah pernah disampaikan idenya di artikel koran, ruang seminar atau jurnal ilmiah, tapi dengan dikumpulkan dalam satu buku maka editor berharap bahwa pemikiran dan solusi lebih mudah di akses dan saling mengisi sehingga lebih panjang masa relevansinya.

Buku ini disusun untuk menjawab beberapa permasalahan besar ekonomi Indonesia sehingga dibagi menjadi tujuh kluster yaitu:

(1) Transformasi Struktural; (2) SDM, Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Jaminan Sosial, (3) Energi, Infrastruktur, Perhubungan dan Perumahan; (4) *Public Finance*, Otonomi Daerah, Birokrasi dan Institusi; (5) Industri, Perdagangan, BUMN, UMKM dan Daya Saing; (6) Moneter, Keuangan, Pasar Modal dan Sektor Jasa; (7) Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup

Kluster pertama dengan tema “Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia” ditempatkan didepan untuk menampilkan berbagai analisa jangka panjang dan lintas sektor (*longee duree*). Perencanaan kebijakan publik dan ekonomi membutuhkan target jangka panjang (*indicative planning*) sehingga berbagai kegiatan dan program mempunyai efek akumulasi dan tidak zigzag terlalu jauh. Masuknya Indonesia ke negara berpendapatan menengah di tahun 2020 menjadi fokus beberapa artikel pada kluster ini dengan merekomendasikan langkah-langkah akselerasi pembangunan ke 100 tahun Indonesia di tahun 2045 yang sejahtera sebelum tua.

Kluster kedua dengan tema “SDM, Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Jaminan Sosial” adalah prioritas pertama dari pemerintah Jokowi - Ma’ruf Amin. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 telah menginspirasi beberapa ekonom untuk membedah pemikirannya dalam kluster kedua buku ini. Kesejahteraan ekonomi Indonesia bisa ditingkatkan dengan kenaikan kualitas sumber daya manusia. Mengoptimalkan bonus demografi, ketenagakerjaan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan menjadi bahasan banyak artikel di kluster ini. Untuk mengimbangi bias Jawa, secara khusus editor mengundang ekonom dari Papua untuk menyampaikan kondisi dan analisa dari lapangan. Kluster kedua juga banyak terkait dengan kondisi pandemi Covid sehingga menjadi menjadi bagian analisa beberapa artikel, editor juga mengajak ahli kesehatan untuk berbagi keahlian dan pandangan

Tema kluster ketiga “Energi, Infrastruktur, Perhubungan dan Perumahan” adalah prioritas pertama Presiden Jokowi-JK periode 2014-2019 dan tetap masuk dalam lima prioritas pemerintah periode ini. Sebagai negara dengan area luas berbentuk kepulauan maka tidak mudah, tapi sangat penting, untuk menghubungkan, mensupply energi dan menyediakan rumah bagi 271,3 juta penduduk Indonesia secara merata di berbagai penjuru. Ketika cadangan energi fosil semakin menipis, maka semakin meningkat juga urgensi untuk melakukan transisi ke energi terbarukan.

Kluster ke-empat dengan tema “Public Finance, Otonomi Daerah, Birokrasi dan Institusi” adalah salah satu kluster dengan artikel terbanyak. Pada masa pandemi ketika konsumsi dan investasi serta ekspor turun pertumbuhannya, maka optimalisasi peran

pemerintah menjadi sangat penting. Belanja pemerintah, pajak, dan dana desa banyak menjadi topik artikel di kluster ini. Perlu pengelolaan anggaran pemerintah yang optimal, tepat sasaran dan cepat dicarikan untuk kegiatan kegiatan produktif, dan bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara baik pajak dan non pajak untuk mendukung transformasi penguatan ekonomi Indonesia. Klaster ini juga membedah bagaimana otonomi daerah, birokrasi dan institusi dapat berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berdaya saing

Kluster kelima menyoroti “Industri, Perdagangan, BUMN, UMKM dan Daya Saing” yang walaupun banyak tiap selama pandemi tapi perlu disiapkan langkah-langkah untuk bangkit ketika sudah banyak masyarakat yang mendapat vaksinasi. Struktur ekonomi Indonesia dengan banyak sekali UMKM dan sedikit perusahaan medium dan besar tidaklah optimal. Pola di Asia Timur dan Asia Tenggara adalah industrialisasi berorientasi export (*export oriented manufactur*) yang bernilai tambah tinggi menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan negara perlu di terapkan, *at least partially*, di Indonesia. Peran strategis BUMN yang bukan hanya organisasi yang mencari profit tetapi juga sebagai agen yang membantu pemerintah menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan pengelolaan kekayaan negara menjadikan peningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas BUMN sangat penting.

Kluster ke-enam dengan tema “Moneter, Keuangan, Pasar Modal dan Sektor Jasa” dimana sektor keuangan dan jasa Indonesia masih belum mencapai potensi optimal dengan inklusi finansial yang juga masih rendah. Modal dan dana adalah darah bagi perekonomian sehingga kondisi dengan hanya 49% penduduk dewasa Indonesia mempunyai tabungan di bank menyebabkan Indonesia memiliki biaya model yang lebih tinggi dari negara besar Asean lainnya. Perlu berbagai usaha kreatif dan sistematis sehingga sektor ini makin kuat dan membawa manfaat nyata bagi perekonomian Indonesia tidak hanya di masa pandemi tapi juga setelahnya.

Kulster ketujuh yang *last but not least* memfokuskan pada “Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup.” Sektor pertanian dan kelautan masih mejadi lapangan kerja mayoritas penduduk Indonesia. Selama manusia masih membutuhkan makanan maka sektor ini tetap akan penting. Indonesia termasuk negara yang akan terdampak besar pada perubahan iklim dan kenaikan air laut sehingga perlu disiapkan dari sekarang adaptasi dan mitigasi-nya. Indonesia tahun 2045 tidak akan menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan jika pada pada masa itu mayoritas hutan telah gundul, *coral reef* rusak dan tidak didiami ikan lagi, *biodiversity* hilang dan polusi tak terkendali. Editor secara khusus mengundang Rektor IPB dan beberapa Guru Besar

Pertanian untuk melengkapi analisa dan pemikiran para ekonom di kluster ini.

Telah banyak tenaga dan waktu dicurahkan oleh lebih dari seratus orang dengan keahlian beragam untuk menghadirkan buku ini ke hadapan pembaca. Semoga tidak hanya menghiasi ruang perpustakaan dan pajangan di kantor tapi juga menjadi referensi dan mewarnai kebijakan pemerintah, analisa akademis dan perbincangan publik di masa mendatang

Berly Martawardaya & Esther Sri Astuti

Editor

Daftar Isi

Sekapur Sirih	iii
Daftar Isi	ix
Cluster 1 Transformasi Struktural Ekonomi Indonesia	1
1.1. Setelah Indonesia Naik ke Kelompok Pendapatan Menengah Atas <i>Andrinof A. Chaniago</i>	2
1.2. Sejahtera Sebelum Tua: Menujum Ekonomi Indonesia di Masa Depan <i>Alief Aulia Rezza</i>	7
1.3. Negara Berpendapatan Menengah-Atas, Mengapa Baru Sekarang? <i>Akhmad Rizal Shidiq</i>	15
1.4. Transformasi Ekonomi Indonesia Paska Pandemi: Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan <i>Berly Martawardaya</i>	20
1.5. Arah Perekonomian Indonesia 2045: Menghindari “Jebakan Negara Berpendapatan Menengah” <i>Didin S. Damanhuri</i>	25
1.6. Mengurai Dasar Pertimbangan Transformasi Struktural: Mana yang Kita Pilih? <i>Edi Prio Pambudi</i>	30
1.7. Transformasi Struktural, Pengembangan <i>Bio-Industry</i> dan Peningkatan Kualitas SDM Perdesaan <i>Hermanto Siregar</i>	36
1.8. Transformasi Ekonomi Indonesia: Survei Perkembangan Terkini <i>Mudrajad Kuncoro</i>	43
1.9. Bermimpi Ekonomi Indonesia Kuat Tahun 2030 <i>Muliadi Widjaja</i>	75
1.10. Pandemi dan Transformasi Ekonomi <i>A. Prasetyantoko</i>	80
1.11. Filantropi Islam dan Tranformasi Ekonomi Indonesia <i>Rahmatina A. Kasri</i>	88

Cluster 2	Sumberdaya Manusia, Tenaga Kerja, Kemiskinan,dan Jaminan Sosial	97
2.1.	Intervensi Promosi Kesehatan Melalui Perubahan Pola Hidup <i>Achmad Kautsar</i>	98
2.2.	Pandemi Multirupa: Bagaimana Mengatasi Isu Kesehatan, Ekonomi, dan Pertarungan Ide? <i>Ahmad Fuady</i>	106
2.3.	Peran Perguruan Tinggi dalam Menjawab <i>Digital Talent Gap</i> <i>Dana S. Saroso</i>	113
2.4.	Angkatan Kerja di Indonesia: Jalan Panjang Menuju Kelas Menengah <i>Devanto Shasta Pratomo</i>	122
2.5.	Pandemi COVID-19 dan Pertumbuhan Ekonomi: Apa Legasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo? <i>Dradjad H. Wibowo</i>	130
2.6.	Relevansi Gotong-Royong di Masa Pandemi <i>Evi Noor Afifah</i>	141
2.7.	Upaya Penanganan Dampak COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi <i>Elan Satriawan</i>	149
2.8.	Risiko di Depan Kita: Menghadapi Potensi Perangkap Perlombaan ke Bawah <i>Fakhrul Fulvian</i>	156
2.9.	Covid-19 dan Kemungkinan Krisis Ekonomi <i>Lukman Hakim</i>	162
2.10.	Transformasi Perlindungan Sosial Guna Melindungi <i>Scooter Class</i> <i>Martin Daniel Siyaranamual</i>	167
2.11.	Kemiskinan dan Kesenjangan di Provinsi Papua <i>Mesak Iek</i>	179
2.12.	Perubahan Struktur Ekonomi dan Komposisi Tenaga Kerja di Indonesia <i>Muhammad Amir Arham</i>	185
2.13.	Sektor Pendidikan dan Pandemi dalam Perspektif Ekonomika Keperilakuan <i>Muhammad Ryan Sanjaya</i>	198
2.14.	Indonesia 2020: Mewujudkan Rakyat Sehat dan Produktif <i>Ninasapti Triaswati</i>	207

2.15.	Ketika Nature Bergerak; Relevansi Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Covid-19 <i>Rimawan Pradiptyo</i>	215
2.16.	Membenahi Data Perlindungan Sosial <i>Sonny Harry B Harmadi</i>	229
2.17.	Membangun Sumberdaya Manusia dengan Sistem Perlindungan Sosial <i>Sudarno Sumarto</i>	235
2.18.	Strategi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 <i>Suharnomo</i>	245
2.19.	Teknologi Digital, Otomatisasi dan Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia <i>Teguh Yudo Wicaksono</i>	253
2.20.	Indonesia Perlu Meneruskan Investasi pada “Bonus” Demografi Lainnya <i>Turro Wongkuren</i>	267
Cluster 3	Energi, Perhubungan, Perumahan dan Infrastruktur	275
3.1.	Makan Bubur Panas di Tengah Pandemi <i>Arie Fitria</i>	276
3.2.	Membedah Sektor Pelayaran, Membedah Tren ke Depan <i>Ibrahim Kholilul Rohman</i>	287
3.3.	Batalkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara! <i>Marwan Batubara</i>	299
3.4.	Indonesia: Diplomasi <i>Hydrocarbon</i> dan Potensi Biomasa <i>Nuki Agya Utama</i>	305
3.5.	Energi Terbarukan Solusi Membangun Kemandirian <i>Maxensius Tri Sambodo</i>	313
3.6.	Teknologi Digital dan Pembangunan Ekonomi Kawasan 3T <i>Tirta Nugraha Mursitama</i>	324
3.7.	Peran Besar Santri dalam Pengembangan Sektor Perumahan <i>Winang Budoyo</i>	330

Cluster 4 Public Finance, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, dan Institusi	337
4.1. Desa dan Taman Keadilan <i>Ahmad Erani Yustika</i>	338
4.2. Indonesia Sudah Menjadi Masyarakat Urban, Tapi Kota-kota Kita Belum Siap <i>Ari Perdana</i>	343
4.3. Utang Pemerintah Makin Membebani Perekonomian <i>Awalil Rizky</i>	350
4.4. Dana Desa: Implikasi Membangun dari Pinggiran <i>Candra Fajri Ananda</i>	359
4.5. Dukungan Sektor Pajak bagi Transformasi dan Penguatan Ekonomi Indonesia <i>Darussalam</i>	372
4.6. Ekonomi Politik Kebijakan Covid-19 <i>Didik J. Rachbini & Omar Abdillah</i>	381
4.7. Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Wilayah <i>Eddy Suratman</i>	391
4.8. Keluar dari Zona Merah Pertumbuhan Ekonomi <i>Eko Listiyanto</i>	397
4.9. Covid-19 dan Digitalisasi Ekonomi dan Momentum Transformasi Kebijakan Publik di Indonesia <i>Fajri Muharja</i>	401
4.10. Korupsi dan Perekonomian <i>Firmanzah</i>	410
4.11. Tantangan Kebijakan Fiskal Tahun 2021 <i>Handi Risza</i>	418
4.12. Peran Otoritas Menghadapi Wabah Covid-19 <i>Marsuki</i>	426
4.13. Kebijakan Fiskal Menghadapi Pandemi <i>Masyita Crystallin</i>	430
4.14. Covid-19 dan Kesadaran Pembangunan yang Inklusif <i>Nunung Nuryartono</i>	441
4.15. Governanza dan Pembangunan Berkelanjutan <i>Pitri Yandri dan D. S. Priyarsono</i>	445

4.16.	Prediksi Dampak Reformasi Regulasi terhadap Perekonomian Indonesia : Perspektif Literatur dan Empiris <i>Telisa Aulia Falianty</i>	452
4.17.	Komunikasi Kebijakan Pemerintah di Era Desentralisasi dan Pelajaran yang Dapat Diambil Pada Saat Pandemi <i>Yogi Vidyattama</i>	457
4.18.	Modal Sosial, Rekognisi dan Transformasi Menuju Kemandirian Ekonomi Desa <i>Wildan Syafitri</i>	463
4.19.	Wajah Kondisi Fiskal Pasca Pandemi <i>Yustinus Prastowo</i>	474
Cluster 5	Industri, Perdagangan, Daya Saing, UKM & BUMN	483
5.1.	Dari Deindustrialisasi Prematur ke Fleksibilitas Manufaktur: Adakah Peluangnya? <i>Aloysius Gunadi Brata</i>	484
5.2.	Digital Ekonomi Sirkular RT/RW Tukar Barang untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melawan Pandemi Covid-19 <i>Ardian Nengkoda</i>	490
5.3.	Memaknai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada Keberlanjutan Bisnis UMKM <i>Dina Nurul Fitria</i>	495
5.4.	Belt and Road Initiative: Akankah Indonesia Menerima Manfaatnya? <i>Eka Puspitawati</i>	501
5.5.	Memajukan UMKM <i>Faisal Basri</i>	508
5.6.	Mengungkit Ekonomi Melalui Industrialisasi <i>Fithra Faisal Hastiadi</i>	511
5.7.	Menjaga Persaingan Usaha dalam industri <i>e-commerce</i> <i>Guntur Saragih</i>	518
5.8.	Membangun Kawasan Perdesaan Dengan Model Ekonomi Sirkular Berbasis Keamanan Pangan dan Kemandirian Energi <i>Ichsan</i>	528

5.9. Zakat dan Wakaf untuk Penguatan Usaha Mikro <i>Irfan Syauqi Beik</i>	538
5.10. Transformasi Teknologi Sektor Manufaktur untuk Menangkal Deindustrialisasi <i>Josua Pardede</i>	545
5.11. Hukum Persaingan Usaha dan Tantangannya di Era Penerapan Bisnis Digital dan <i>E-Commerce</i> <i>Kodrat Wibowo</i>	547
5.12. Soliditas Lembaga dalam Mendukung Penguatan Industrialisasi <i>Mohamad Ajie Maulendra</i>	555
5.13. Liberalisasi dan peran Indonesia di WTO <i>Moch Faisal Karim</i>	562
5.14. Badan Usaha Milik Desa: Membangun Masa Depan Perekonomian Indonesia dari Desa <i>Mohamad D. Revindo dan Sean Hambali</i>	569
5.15. Langkah Lanjut Pemberdayaan UMKM Paska Pandemi <i>Muliaman D. Hadad</i>	585
5.16. Literasi Keuangan Generasi Milenial: Urgensi dan Tuntutan Zaman <i>Prima Naomi</i>	596
5.17. Parawisata dan Ekonomi Kreatif: Percepatan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Pesisir Berbasis Kekayaan Sumber Daya Alam dan Wisata Kuliner sebagai Leading Sektor di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang <i>Ramli</i>	605
5.18. Tata Kelola Perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Permasalahan dan Tantangan ke Depan <i>Ratna Wardhani</i>	613
5.19. Strategi Kebangkitan Sektor Produktif Menuju Normal Baru <i>Rina Indiasuti</i>	647
5.20. Pandemi Covid-19 Percepat Transformasi Ekonomi Digital <i>Sri Adiningsih</i>	653

5.21.	Kebijakan dan Strategi Penguatan BUMN ke Depan <i>Sunarsip</i>	663
5.22.	Pandemi, Penciptaan Nilai Publik dan Kontrak Sosial Perusahaan <i>Ubaidillah Nugraha</i>	670
5.23.	<i>Servicification</i> pada Sektor Manufaktur: Penghela Ekonomi Indonesia <i>Widyastutik</i>	678
Cluster 6	Moneter, Keuangan, Pasar Modal, dan Sektor Jasa	683
61.	Cetak Uang: Solusi atau Mubazir <i>Anton Hendranata</i>	684
6.2.	Sigap Menjaga Sektor Perbankan <i>Aviliani</i>	691
6.3.	Mencari Solusi <i>Financing Gap</i> di Indonesia <i>Dian Ayu Yustina</i>	695
6.4.	Perbankan Era 4.0: Potensi, Risiko dan Tantangan Transformasi <i>Moch. Doddy Ariefianto</i>	701
6.5.	Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia <i>Ernie Tisnawati Sule</i>	705
6.6.	Kestabilan Konsumsi Rumah Tangga untuk Mempertahankan Apresiasi Nilai Tukar Rupiah <i>Eugenia Mardanugraha</i>	715
6.7.	Covid-19, <i>Universal Basic Income</i> dan <i>Modern Monetary Theory</i> <i>M. Fadhil Hasan</i>	720
6.8.	Arah Perbankan Digital Indonesia; Peluang dan Tantangan <i>Mohamad Adam</i>	724
6.9.	Menjaga Perbankan di Tengah Pandemi <i>Piter Abdullah Redjalam</i>	731
6.10.	Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia untuk Menangani Covid-19: Peluang dan Tantangan di Jangka Menengah-Panjang <i>Puspa Delima Amri dan Yudistira Slamet</i>	735
6.11.	Bank Sentral yang Merdeka <i>Putera Satria Sambijantoro</i>	749

6.12.	Meningkatkan Akses Masyarakat ke Layanan Jasa Keuangan <i>Rudi Purwono</i>	754
6.13.	Kebijakan Moneter dan Stabilitas Perbankan Mengatasi Kejutan Eksternal <i>Umar Juoro</i>	761
Cluster 7	Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup	767
7.1.	Ekonomi Sawit Indonesia di Tengah Isu Keberlanjutan <i>Achmad Adhitya</i>	768
7.2.	Ekonomi Berkelanjutan dalam Persimpangan <i>Achmad Deni Daruri</i>	772
7.3.	Tantangan Pangan Indonesia ditengah Pandemi Covid-19 <i>Arif Satria dan Alfian Helmi</i>	777
7.4.	Ekonomi Kepulauan yang Inklusif: Manusia, Laut, dan Pulau <i>Athor Subroto</i>	785
7.5.	Tiga Tantangan Agribisnis dan Kepakan Sayap Kupu-kupu SDG <i>Bayu Krisnamurthi</i>	792
7.6.	Krisis Pangan 2020: Anatomi, Transmisi, dan Antisipasi <i>Bustanul Arifin</i>	797
7.7.	Reforma Agraria Kehutanan: Ihtiar Meretas Jalan Kedaulatan Bangsa <i>Endriatmo Soetarto dan Eko Cahyono</i>	806
7.8.	Menggapai Mimpi Swasembada Gula <i>Esther Sri Astuti S.A.</i>	818
7.9.	Mengubah Strategi Program Ketahanan Pangan di Masa Pandemi <i>Harryadin Mahardika</i>	823
7.10.	Merevitalisasi Kearifan Lokal untuk Mendukung Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam <i>Mansur Afifi</i>	832

7.11. UU Cipta Kerja dan Transformasi Kebijakan Pangan Pasca Pandemi Covid <i>Muhammad Firdaus</i>	842
7.12. Transformasi Pasar Produk Pertanian di Indonesia: <i>From Conventional Wet Market to Digital Market Sahara</i>	849
7.13. Tranformasi Ekonomi dan Kutukan Sumber Daya Alam <i>Tata Mustasya</i>	860

2.16. Membenahi Data Perlindungan Sosial

Sonny Harry B Harmadi



Sonny Harry Budiutomo Harmadi adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 sejak pertengahan Agustus 2020 lalu. Beberapa posisi penting yang pernah didudukinya, antara lain adalah Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan (2016-2020), Staf Ahli Bidang Kependudukan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia (2009-2016), dan

sejak Desember 2010 hingga sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia yang memiliki perwakilan di 33 provinsi dan hampir 300 kabupaten/kota di Indonesia. Sonny menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (2005). Menjadi pengajar dan peneliti tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2002–2019), dan sejak Desember 2019 tercatat sebagai pengajar di Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Selain itu, Sonny aktif memberi kuliah di antaranya di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Sekolah Staf Komando TNI AL (Seskoal) dan Sespimti Polri. Dia adalah Alumni Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII Lemhannas RI. Beberapa penghargaan pernah diraihinya, di antaranya peneliti muda terbaik Universitas Indonesia untuk bidang Sosial Humaniora (2008) dan Peringkat I peneliti berprestasi Universitas Indonesia (2009). Pada tahun 2010, Sonny ditetapkan sebagai dosen berprestasi Peringkat I Universitas Indonesia dan dosen berprestasi nasional Peringkat 3 yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Keputusan Pemerintah untuk memperluas cakupan dan jenis bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin dan terdampak pandemi Covid-19 sudah tepat. Melalui program bantuan sosial non reguler, Pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat, meminimalisir tambahan kemiskinan baru, serta menjaga permintaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menganggarkan Rp39,2 triliun bansos tunai non-Jabodetabek dan bansos sembako Jabodetabek. Selain itu, masih ada alokasi anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa dengan nilai mencapai hampir Rp32 triliun. Belum lagi bansos lainnya seperti subsidi listrik yang mencapai hampir Rp62 triliun. Pada saat bersamaan, bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan dianggarkan lebih dari Rp37 triliun dengan sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan bansos kartu sembako yang merupakan transformasi bantuan pangan nontunai (BPNT) anggarannya mencapai Rp43,6 triliun untuk 20 juta KPM. Nilai berbagai bansos tersebut mencapai Rp213,8 triliun ditambah berbagai jenis bantuan sosial maupun jaminan sosial lainnya.

Dengan anggaran bansos yang demikian besar, efektivitas bansos sangat ditentukan oleh akurasi data penerima manfaat. Sejumlah fakta lapangan menunjukkan bahwa *inclusion* dan *exclusion error* masih tetap terjadi. Keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak menerima bantuan (*exclusion error*). Juga masih ditemukan keluarga yang dianggap tidak layak menerima bantuan namun menerima bantuan sosial dari Pemerintah (*inclusion error*). Ketidaktepatan sasaran ini tentu berdampak terhadap kinerja program perlindungan sosial yang diukur dari indikator kemiskinan dan ketimpangan. Semakin baik datanya, semakin tepat sarannya, dan dampaknya adalah semakin cepat kita mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan.

Baik bansos reguler maupun nonreguler menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dasar penetapan penerima manfaat. Namun pada penyaluran bansos nonreguler dimungkinkan penerima manfaat di luar DTKS jika memenuhi kriteria yang ditetapkan. Implementasi bansos reguler seperti BPNT hampir selalu berjalan lancar. Tetapi mengapa penyaluran bansos nonreguler justru mengalami masalah?

Penyebabnya karena rumah tangga yang butuh bantuan meningkat drastis. Di Jabodetabek, saat kondisi normal, jumlah penerima bansos reguler BPNT hanya 744.062 rumah tangga. Padahal, menurut data survei angkatan kerja nasional

(Sakernas) BPS Agustus 2019, jumlah orang berusaha sendiri di Jabodetabek mencapai 3,9 juta orang, mulai dari pedagang asongan hingga dokter. Katakan setengahnya saja tiba-tiba kehilangan pendapatan dan butuh bantuan. Berarti hampir 2 juta pencari nafkah yang mendadak butuh bansos. Lalu masih ada 3,4 juta orang di Jabodetabek yang berstatus pekerja tanpa kontrak tertulis dan sangat terdampak. Belum lagi pekerja pabrik yang di-PHK atau dirumahkan. Alhasil, bansos regular saat kondisi normal hanya menysasar 744 ribu rumah tangga, menjadi sangat tidak memadai di saat pandemi seperti sekarang.

Dampak pandemi Covid-19 begitu cepat dan luas. Tak mudah mendata tambahan rumah tangga baru yang membutuhkan bansos dalam waktu singkat. Namun publik juga perlu tahu bahwa meskipun belum sempurna, akurasi data target rumah tangga penerima bansos regular Indonesia cukup baik, mencapai 85%, lebih baik dibanding beberapa negara seperti Meksiko (62%), Chili (83%), maupun Honduras (79%).

Pengembangan Data Terpadu

Dari waktu ke waktu, Indonesia terus menyempurnakan data terpadu perlindungan sosial sebagai dasar penetapan sasaran penerima program bansos maupun jaminan sosial. Dimulai dari pendataan sosial ekonomi (PSE) tahun 2005, Pemerintah mendata 19,1 juta rumah tangga, *by name by address*, dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Tahun 2008 dilakukan pemutakhiran data PSE tahun 2005 terhadap 18,5 juta rumah tangga (60,4 juta penduduk). Hasilnya disebut pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2008 yang menjadi dasar pelaksanaan program mengatasi kemiskinan seperti PKH.

Pemerintah juga terus memperbaiki metodologi pendataan. Pada tahun 2011 dilakukan lagi pemutakhiran data (dikenal dengan PPLS 2011), menggunakan metodologi yang lebih baik dibanding PPLS tahun 2008. Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (25,2 juta rumah tangga) dan menjadikan data Sensus Penduduk 2010 sebagai *starting point*. Dengan menggunakan *proxy mean testing* (PMT), hasil PPLS tahun 2011 diolah menjadi basis data terpadu (BDT) tahun 2011. Metode PMT meranking rumah tangga dari mulai yang termiskin hingga kurang miskin sesuai kriteria yang ditetapkan.

BDT tahun 2011 dimutakhirkan kembali di periode kepemimpinan Presiden Jokowi pada tahun 2015. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 menjadi “sensus” rumah tangga miskin yang terakhir. PBDT tahun 2015

mengalami penyempurnaan metodologi dibanding BDT tahun 2011, di mana daftar rumah tangga dalam data terpadu dimusyawarahkan dan disepakati terlebih dahulu di Forum Komunikasi Publik (FKP) tingkat desa. Kualitas data lebih baik dan mendekati fakta lapangan.

Sejak tahun 2016, pengelolaan data terpadu secara bertahap beralih dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ke Kemensos, berkembang menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun pemutakhirannya diserahkan ke Pemerintah Daerah. DTKS tahun 2020 memuat informasi sosial, ekonomi, demografi dari 27.060.751 rumah tangga, 29.085.939 keluarga, 97.388.064 jiwa dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Namun masalahnya, DTKS tahun 2020 masih banyak yang belum dimutakhirkan. Tidak banyak daerah melakukan pemutakhiran dalam empat tahun terakhir. Baru saat Pemerintah mengumumkan pemberian bansos nonreguler, lebih dari 500 kabupaten/kota memutakhirkan data dalam waktu singkat, dan ini berdampak terhadap akurasi data yang dihasilkan.

Solusi Satu Data Termutakhirkan

Terdapat tiga solusi utama terkait data terpadu kesejahteraan sosial. *Pertama*, penerapan prinsip satu data perlindungan sosial, mengacu Perpres Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah upaya Pemerintah mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemenuhan atas data Pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan kembali oleh pengguna data. Prinsip dasar satu data Indonesia ialah satu standar data, satu metadata baku, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi yang telah disepakati secara nasional. Pemanfaatan data Pemerintah tidak hanya terbatas untuk internal instansi saja, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

Seluruh program perlindungan sosial seharusnya didasarkan pada satu standar data berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Data tersebut harus mudah diakses, dapat dibagi-pakaikan oleh institusi pelaksana program perlindungan sosial, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pengalaman bansos pendidikan yang lalu, Kemendikbud tidak mengacu pada DTKS, namun menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) sebagai acuan intervensi. Untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN), masih ada 15 juta penerima bantuan iuran BPJS

Kesehatan yang tak tercatat di DTKS. Karena saat pemberlakuan program JKN di awal tahun 2015, Pemerintah harus mengakomodir data penerima manfaat yang sebelumnya masuk dalam program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Subsidi energi (listrik dan gas) juga harus mengacu pada DTKS.

Jika seluruh program perlindungan sosial berbasis data yang sama, Pemerintah dapat memetakan keragaman dan kombinasi program perlindungan sosial yang diterima masyarakat. Keluarga paling miskin seharusnya menerima jenis program perlindungan sosial paling lengkap. Informasi yang diperoleh dapat dikembangkan untuk mengestimasi perkiraan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, Pemerintah perlu memiliki data registrasi sosial (*social registry*) dengan cakupan yang lebih besar. DTKS saat ini memuat data 40% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia. Dengan memperluas cakupan, *social registry* berisikan data penduduk (rumah tangga) *by name by address* (BNBA) lebih dari 40% rumah tangga di Indonesia. Sebaiknya, berkisar antara 60 hingga 70% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Namun akan jauh lebih baik jika bisa mencakup 100% rumah tangga. Pada kondisi normal mungkin hanya 20-30% rumah tangga yang menerima program perlindungan sosial reguler. Data penerima bantuan reguler tersebut tercatat dalam *beneficiary registry* yang merupakan subset dari data *social registry*. Di saat kejadian tiba-tiba seperti pandemi ini, jumlah rumah tangga yang membutuhkan program perlindungan sosial dapat melonjak drastis hingga 60%. Jika kita memiliki data *social registry* yang mencakup misalnya 70% rumah tangga di Indonesia, maka Pemerintah sudah memiliki datanya. Tidak lagi kesulitan karena harus mendata rumah tangga baru di luar DTKS. Data menunjukkan bahwa kejadian bencana baik alam maupun nonalam terus meningkat dan menciptakan risiko kerentanan yang dapat menimbulkan kemiskinan baru.

Ketiga, data perlindungan sosial harus dimutakhirkan secara reguler. Mengapa perlu pemutakhiran data? Karena secara alamiah selalu terjadi dinamika yang disebabkan tiga peristiwa penting kependudukan, yaitu kematian, perkawinan (terbentuknya keluarga baru), maupun perpindahan (migrasi). Selain itu, di masyarakat juga terjadi dinamika kesejahteraan. Ada rumah tangga yang keluar dari kemiskinan, dan ada juga yang masuk ke dalam kemiskinan.

Meskipun prosedur pemutakhiran DTKS sudah diatur dalam Permensos No. 5/2019, namun Kemensos didukung

Kemendagri sebagai pembina daerah perlu melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap Pemda. Sumberdaya manusia dan keuangan di setiap daerah tidak sama. Tanpa pendampingan yang memadai, beberapa daerah dengan kapasitas terbatas akan sulit melakukan pemutakhiran data, berujung ketidaktepatan sasaran. Kita juga perlu membangun mekanisme pendaftaran mandiri bagi yang membutuhkan perlindungan sosial secara *real time*. Data penerima bansos nonreguler pandemi Covid-19 (bansos tunai, bansos sembako, maupun BLT dana desa) yang tidak ada dalam DTKS, agar menjadi *prelist* bagi pemutakhiran DTKS berikutnya.

Satu data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat dan termutakhirkan tentu menjadi aset berharga bagi bangsa ini. Pengelolaan bersama DTKS perlu koordinasi terpadu lintas kementerian dan membutuhkan suatu forum pembahasan. Seperti halnya di tingkat desa, dibutuhkan forum komunikasi publik tingkat nasional. Pengelolaan data *beneficiary registry* menjadi kewenangan Kemensos selaku pelaksana program bantuan sosial. Namun data *social registry* bisa dikelola oleh Kemenko PMK atau di bawah koordinasi langsung Wakil Presiden, dibahas secara reguler dalam forum komunikasi publik nasional.

Kita yakin bahwa setiap kebijakan yang berkualitas pasti mengacu pada data berkualitas. Dengan menerapkan solusi di atas, karut marut data penerima program perlindungan sosial dapat dihindari di masa depan. Membangun dan mengelola data terpadu ibarat orkestrasi yang membutuhkan kerjasama antarinstansi dan jenjang pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Orkestra yang indah akan terwujud jika semua pihak tahu dan mau menjalankan perannya dengan tepat.

Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing

Pemikiran 100 Ekonom Indonesia

Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan (*annus horribilis*) bagi dunia dan Indonesia dengan datangnya Pandemi Covid-19 yang memaksa pemerintah, dunia usaha dan rumah tangga untuk merubah rencana dan perilakunya. Perubahan tersebut punya dampak ekonomi yang besar sehingga kita menyaksikan kontraksi ekonomi terbesar sejak Krismon 98. Untuk merespon kondisi yang luar biasa ini, dibutuhkan berbagai pemikiran dan opsi solusi yang tidak biasa dari kelompok orang yang luar biasa juga. Buku ini adalah upaya untuk mengumpulkan pemikiran dan solusi tersebut dari para tokoh pembuat kebijakan di pemerintah, akademisi, praktisi, dan pegiat masyarakat sipil.

Buku ini dibagi dalam tujuh kluster tantangan besar ekonomi Indonesia yaitu: (1) Transformasi Struktural; (2) SDM, Tenaga Kerja, Kemiskinan dan Jaminan Sosial, (3) Energi, Infrastruktur, Perhubungan dan Perumahan; (4) *Public Finance*, Otonomi Daerah, Birokrasi dan Institusi; (5) Industri, Perdagangan, BUMN, UMKM dan Daya Saing; (6) Moneter, Keuangan, Pasar Modal dan Sektor Jasa; (7) Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup.

Sebagian besar kontributor adalah ekonom, tapi juga terdapat artikel yang ditulis ahli kesehatan, sosial, pertanian dan teknik karena masalah ekonomi Indonesia terlalu besar dan kompleks untuk hanya dijawab oleh ekonom. Dari segi lokasi, secara khusus diundang kontributor dari berbagai pelosok Indonesia dan yang sedang berada di luar negeri untuk memberikan perspektif yang lebih beragam. Almarhum Prof M. Sadli sebagai ekonom senior yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Tambang dan Energi menyatakan bahwa "*Good times give rise to lazy populist economic policies while crisis times produce good policies*". Moga-moga buku ini turut mendorong berbagai kebijakan yang mempercepat pemulihan, mendorong transformasi struktural dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia paska Pandemi Covid-19. Selamat membaca!

Penerbit
INDEF
Jl. Batu Merah No. 45 Pejaten Timur
Jakarta Selatan, 12510
www.indef.or.id

ISBN 978-623-6999-04-2

